



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI I DPR RI**

- Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : III
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Dirjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Dirjen Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Hari, Tanggal : Selasa, 6 Februari 2018
Pukul : 10.48 WIB – 11.56 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : H.A. Hanafi Rais, S.IP., M.PP., Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP., M.SI., Kabag Sekretariat Komisi I DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Acara : Pandangan atau terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (*Defence Cooperation Agreement between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Kingdom of Saudi Arabia*).
- Anggota yang Hadir : **PIMPINAN:**
1. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)
 2. Ir. Bambang Wuryanto, M.BA. (F-PDI Perjuangan)
 3. Meutya Viada Hafid, S.Sos. (F-PG)
 4. Asril Hamzah Tanjung, S.IP. (F-Gerindra)
 5. H.A. Hanafi Rais, S.IP., M.PP. (F-PAN)

ANGGOTA:

FRAKSI PDI-PERJUANGAN

6. Dr. TB. Hasanuddin, S.E., M.M.
7. Ir. Rudianto Tjen
8. Dr. Effendi MS Simbolon, M.I.Pol.
9. Charles Honoris
10. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.
11. Andreas Hugo Pareira
12. Djenri Alting Keintjem

13. Junico BP Siahaan
14. Jimmy Demianus Ijie

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

15. Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si.
16. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E. Ak., M.B.A., C.F.E.
17. Dave Akbarshah Fikarno, M.E.
18. Bambang Atmanto Wiyogo
19. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn.
20. A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, M.H.

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)

21. H. Ahmad Muzani
22. Martin Hutabarat
23. H. Biem Triani Benjamin, B.Sc., M.M.
24. Rachel Maryam Sayidina
25. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

26. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., M.T.
27. Dr. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.BA
28. H. Darizal Basir
29. Ir. Hari Kartana, M.M.
30. KRMT Roy Suryo Notodiprojo

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

31. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.
32. Budi Youyastri
33. H.M. Syafrudin, S.T., M.M.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

34. Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si
35. Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si
36. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, M.P.
37. Arvin Hakim Thoha

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

38. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A.
39. Dr. H. Sukamta, Ph.D.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

40. Moh. Arwani Thomafi
41. Hj. Kartika Yudhisti, B.Eng., M.Sc.
42. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)

43. Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A.
44. Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra
45. Victor Bungtilu Laiskodat

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT (F-HANURA)

46. Ir. Nurdin Tampubolon, M.M.

47. Mohamad Arief Suditomo, S.H., M.A.

- Anggota yang Izin : 1. Venny Devianti, S.Sos. (F-PG)
2. Elnino M. Husein Mohi, S.T., M.Si. (F-GERINDRA)
3. Ir. Alimin Abdullah (F-PAN)
4. Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A. (F-PKS)
5. Prananda Surya Paloh (F-NASDEM)
- Undangan : 1. SesDitjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI M. Nakir, S.IP., M.H.
2. Dirjen Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Bambang Hartawan, M.Sc.
3. SesDitjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Sunaryo, S.E.
4. Sektretaris Direktorat Jenderal Hukum Dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, Dr. Iur. Damos Dumoli Agusman, S.H., M.A.
5. Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri, Sunarko. beserta jajaran.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi;

Salam sejahtera untuk kita semua.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Selamat datang kepada seluruh jajaran Pimpinan Kementerian Pertahanan, dan juga Kementerian Luar Negeri serta yang akan datang dari Kemenkumham dan juga tentu Bapak/Ibu Anggota Komisi I yang terhormat yang pada pagi hari ini kita akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat terkait dengan Pengesahan Persetujuan Kerjasama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, *Defence Cooperation Agreement (DCA)* antara Indonesia dan Saudi Arabia. Sesuai dengan informasi dari Sekretariat, kita sudah bisa memulai rapat ini karena sudah memenuhi kuorum dan saya meminta kesepakatan dari Bapak/Ibu semua Rapat Dengar Pendapat kita ini kita adakan secara terbuka, setuju ya?

Setuju ya terbuka ya?

Dengan begitu, rapat saya buka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.48 WIB)

Pada agenda tunggal kita pada pagi hari ini, kita akan mendengar penjelasan dari Bapak-bapak semua. Ini yang di depan Bapak-bapak semua terkait dengan pengesahan persetujuan kerja sama pertahanan atau *Defence Cooperation Agreement (DCA)* antara Indonesia dengan Arab Saudi. Saya perlu sampaikan Bapak-bapak semua pada beberapa waktu yang lalu, kita juga sudah mengadakan RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) dengan para pakar atau akademisi untuk mendapatkan masukan terkait dengan RUU *Defence Cooperation Agreement*.

Dalam RDPU itu ada beberapa point yang perlu disampaikan disini yang menjadi catatan sekaligus juga pertanyaan, mungkin nanti juga jadi bahan untuk pendalaman kita pada RDP pagi hari ini.

1. Perjanjian Kerjasama Pertahanan antara Indonesia dan Arab Saudi ini dibuat Tahun 2014. Muncul pertanyaan apakah masih punya relevansi atau harus ada aspek-aspek yang ditambahkan mengingat kita paham betul dinamika politik di Timur Tengah ini sudah banyak berubah pada akhir-akhir ini terutama menyangkut Arab Saudi sendiri.
2. Ada pertanyaan mengenai maksud dari *frase* bidang kerja sama militer lain yang tertulis pada Pasal 2 poin 6 dari perjanjian tersebut.

Dalam diskusi dengan para pakar atau akademisi, catatan dari Komisi I kita juga mempertanyakan kira-kira implementasi yang konkrit dari perjanjian itu nanti bentuknya seperti apa, implementasi *agreement*-nya itu seperti apa. Kemudian kalau kita ratifikasi, ada urgensi apa. Kemudian bahwa, RUU ini kemudian sifatnya punya kemendesakan sehingga kita ini harus segera meratifikasi. Kok juga baru sekarang, kenapa tidak misalnya dulu-dulu sebelumnya dan tentu karena ini hubungan luar negeri dengan negara lain, kita ingin mengetahui lebih dalam keuntungan yang didapat dari ratifikasi atas DCA ini dan yang terakhir adalah terkait dengan istilah Komisi Militer. Nah mungkin nanti Bapak bisa memberikan penjelasan lebih detail lagi.

Kurang lebih itu yang menjadi catatan dari RDPU kita beberapa waktu yang lalu. Yang jelas Bapak-bapak semangatnya adalah kita ingin mengetahui betul kalau ini diratifikasi itu memang membawa optimalisasi atas kepentingan nasional kita karena kita berhubungan dengan negara asing mana pun dalam hal ini adalah Arab Saudi tetapi juga di sisi lain Arab Saudi ini berubah begitu drastis, bahkan kita juga paham sudah punya Aliansi Militer sendiri dalam rangka mengatasi ancaman keamanan di Negara-negara tetangganya termasuk Yaman khususnya pada perkembangan akhir-akhir ini dan tentu kita tidak ingin kalau ini kemudian diratifikasi, lantas kemudian ini seolah-olah dibaca atau ditafsirkan oleh masyarakat internasional atau bahkan oleh Saudi sendiri yang menurut catatan para pakar kemarin kalau sudah *agreement* itu lantas nanti bisa dibelokan atau ditafsirkan menjadi Aliansi Militer begitu. Mungkin kita akan selalu teguh pendirian bahwa ini bukan Aliansi Militer Taktis, tetapi kita tidak tahu bagaimana setelah diimplementasikan apakah Saudi punya prinsip yang sama karena ancaman keamanan di negara tersebut maupun di kawasan Timur Tengah sebegitu *urgent* bagi negara-negara itu untuk saling mengambil sikap politik militernya. Nah kita tidak ingin terbawa oleh arus dinamika tersebut, muncul pula saran kemarin kalau pun harus ratifikasi, kita tunggu situasinya mungkin *cooling down* terlebih dahulu. Cuman ini kita tidak tahu *cooling down*-nya lama atau tiba-tiba *cooling down*, kita tidak pernah tahu situasi politik yang semacam itu.

Jadi begitu Pak kira-kira suasana kebatinan di Komisi I ketika kita membahas terkait dengan DCA ini dan sekarang saya persilakan kepada Bapak-bapak untuk memaparkan presentasikan dan kita mulai dari Dirjen Strahan Kemhan terlebih dahulu. Kemudian nanti disusul Kuathan, Pothan. Dirjen Hukum dan PI Kemlu, Dirjen Aspasaf Kemlu, dan terakhir dari Kumham.

Saya persilakan.

DIRJEN KEKUATAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN (MAYJEN TNI BAMBANG HARTAWAN, M.SC.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera;

Selamat siang untuk kita semua.

**Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat,
Para Hadirin sekalian yang saya muliakan.**

Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf karena Dirjen Strahan tidak bisa hadir karena sedang mengikuti, ada kegiatan Singapura, mendampingi Menteri Pertahanan Kunjungan ke Singapura, kemudian Dirjen Pothan juga tidak bisa hadir, maka saya Dirjen Kuathan Mayor Jenderal TNI Bambang Hartawan yang tertua dari Kementerian Pertahanan nanti didampingi oleh Ses Ditjen Pothan Brigjen TNI Sunaryo dan Ses. Strahan Brigjen TNI Muhammad Nakir serta Kepala Biro Hukum Marsekal Pertama Bambang Eko. Kami juga didampingi oleh Rekan-rekan dari Kementerian Luar Negeri kemudian beberapa staf kami.

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat wal'afiat pagi ini. Kemudian terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kami untuk menyampaikan penjelasan terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang telah ditandatangani pada 23 Januari 2014 di Jakarta.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hubungan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah terjalin dengan baik melalui pemberian bantuan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk peningkatan pemahaman keagamaan, fasilitas kegiatan ibadah haji bagi personil pertahanan RI, bantuan berupa Kitab Suci Alquran, pembangunan masjid dan sejumlah bantuan lain kepada TNI. Selain itu, posisi Arab Saudi yang memiliki kekuatan militer terkuat di Asia dan ketiga di dunia dengan anggaran sebesar 81 miliar US Dollar, Arab Saudi mampu melengkapi persenjataannya dengan membeli 500 jet tempur modern, 800 *tank leopard*, 2.700 kendaraan lapis baja dan beranggotakan sekitar 230 ribu tentara. Mendasarkan adanya hubungan baik tersebut, Pemerintah Indonesia mengadakan kerja sama di bidang pertahanan dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh Negara Arab Saudi tersebut, maka Arab Saudi dapat dimanfaatkan sebagai mitra kerja sama industry pertahanan. Kerja sama pertahanan ini dikembangkan dan diperkuat berdasarkan prinsip-prinsip kepentingan bersama dan kesetaraan hak yang akan memberikan kontribusi bagi kepentingan bersama kedua negara serta perdamaian dan keamanan dunia. Selain itu, kerja sama di bidang pertahanan ini ditandai dengan penempatan Atase Pertahanan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh pada tanggal 3 Desember 1994. Kerajaan Arab Saudi merupakan Negara Pertama di Timur Tengah yang menandatangani perjanjian kerja sama dengan Indonesia. Hubungan baik juga ditandai dengan Kunjungan Pangeran Salman bin Sultan bin Abdul Azis ke Indonesia pada tanggal 23 Januari 2014 dan bertemu dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia pada saat itu Bapak Purnomo Yusgiantoro serta wakil Menteri Pertahanan yaitu Bapak Safri Syamsuddin. Kedatangan Pangeran Salman bin Sultan bin Abdul Azis tersebut merupakan salah satu bentuk hubungan *bilateral* antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi yang cukup baik. Dalam kunjungan tersebut ditandatangani *Defence Cooperation Agreement* atau Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Dengan ditandatanganinya persetujuan kerja sama pertahanan ini, dimungkinkan adanya tindak lanjut kerja sama di bidang pendidikan militer seperti pertukaran siswa sekolah staf dan komando Angkatan Bersenjata masing-masing negara dan bidang industry pertahanan. Diharapkan dengan adanya kerja sama pertahanan ini, industry pertahanan Indonesia juga semakin dipandang oleh dunia internasional dan kerja sama ini dapat dijadikan sebagai sarana meningkatnya, ulangi, meningkatkan daya jual Indonesia terhadap industry pertahanan yang dimilikinya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat atas segala perhatiannya dalam membahas RUU ini. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas segala pengabdian, dukungan, dan partisipasi kepada Kementerian terkait, semua pihak yang telah mendukung kelancaran pembahasan hingga sampai pada tahapan ini.

Semoga setiap amal perbuatan dan buah pikiran yang kita sumbangkan dalam proses pembahasan RUU ini dapat dinilai sebagai amal ibadah oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, amin ya robbal'amin.

Demikian sambutan saya pertama.

Lebih kurangnya, kami mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Silakan dilanjutkan dengan paparan dari Staf kami tentang *Progress* dari Pembahasan RUU ini Bapak kalau diizinkan.

Silakan Laksamana.

KEKUATAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN (LAKSAMANA):

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Atas seizin Bapak Ketua Tim Pemerintah, mohon izin kami menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan persetujuan kerja sama pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Persetujuan kerja sama pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah ditandatangani pada tanggal 23 Januari 2014 di Jakarta oleh Wakil Menhan RI dan Wakil Menhan Arab Saudi. Materi muatan dalam persetujuan tersebut antara lain Bidang dan lingkup kerja sama meliputi dialog strategis. Kemudian Pertukaran informasi intelijen di bidang pertahanan, pendidikan dan pelatihan militer, industry pertahanan yang mengembangkan kerja sama di bidang teknologi pertahanan termasuk penelitian bersama produksi pemasaran dan alih teknologi. Kemudian juga bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, pemeliharaan perdamaian dan pelayanan logistik. Kemudian kerja sama militer lain yang disepakati oleh para pihak.

Hal lain yang diperjanjikan adalah pembentukan Komisi Militer bersama yang bertanggung jawab mengembangkan kerja sama militer diantara para pihak dan mengatasi setiap hambatan dalam pelaksanaan persetujuan tersebut. Kewajiban untuk saling memberikan perlindungan hal atas kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan persetujuan ini. Selanjutnya juga diatur mengenai perlindungan keamanan informasi. Kedua belah pihak juga akan menanggung biaya masing-masing yang terkait dengan pelaksanaan persetujuan ini.

Selanjutnya juga tentang hal yang terkait dengan penyelesaian perselisihan apabila ada, akan dilakukan secara damai melalui konsultasi diantara para pihak tanpa membawa ke pengadilan atau menghadirkan pihak ketiga.

Selanjutnya kegiatan yang telah dan sedang dijalankan setelah penandatanganan persetujuan antara lain Pertukaran siswa sekolah staf dan komando angkatan bersenjata kedua negara. Itu mulai Tahun 2014 ada 2 perwira TNI yang dikirim untuk mengikuti Sesko di Arab Saudi dan pengiriman perwira Angkatan Bersenjata dari Arab Saudi untuk mengikuti Sesko di Indonesia dan berlangsung hingga saat ini setiap tahunnya. Kemudian pada Bulan November 2014, Konjen RI dengan KRI Frans Kaiceifo 368 melaksanakan latihan bersama dengan HMS Damam 816 di Perairan Laut Merah. Pada akhir Tahun 2014, Kemhan Kerajaan Arab Saudi memberikan kesempatan kepada Kemhan RI untuk mengirim Tenaga Pengajar pada Pusat Bahasa Kemhan untuk mengikuti Kursus Bahasa Arab dan berlatih setiap tahun.

Selanjutnya juga telah dilaksanakan pertemuan *Joint Defence Coordination Committee I* yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2016 di Riyadh Arab Saudi sebagai tindak lanjut dari JDCC Industri Pertahanan masing-masing negara melakukan saling kunjung untuk peninjauan. Pada Bulan April 2016, Delegasi Kemhan Kerajaan Arab Saudi berkunjung ke Indonesia dalam rangka meninjau industry pertahanan Indonesia yaitu PT Pindad, PT DI dan PT PAL. Pada Bulan Mei 2016, diajukan proposal kontrak pemeliharaan beberapa jenis helicopter milik angkatan darat kerajaan Arab Saudi dengan PT DI. Selanjutnya pada Bulan Agustus 2016, telah dilaksanakan uji tank anoa dan beberapa jenis senjata serta amunisi di PT Pindad dalam rangka pembelian Alutsista dan rencana kerja sama Industri Pertahanan. Selanjutnya juga dilaksanakan bantuan hibah beberapa pembangunan yaitu 4 masjid di lingkungan Kemhan dan TNI dan 1 masjid di lingkungan Kemhan. Penyusunan draft hibah diserahkan kepada Dirjen Kuathan, sementara untuk pembangunan laboratorium bahasa masih menunggu hasil kajian dari aspek teknis, ekonomis, politis, dan strategis oleh Dirjen Kuathan Kemhan. Juga telah dilaksanakan peninjauan

terkait dengan Kerja sama intelijen antara Badan Intelijen Kerajaan Arab Saudi dengan Republik Indonesia.

Demikian yang bisa kami sampaikan.

Terima kasih atas perhatian.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Dari Kemhan cukup atau masih ada?

Dari Kemlu silakan.

**SEKTRETARIS DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
KEMENTERIAN LUAR NEGERI (DR. iur. DAMOS DUMOLI AGUSMAN, S.H., M.A.):**

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Bapak Ketua dan Para Anggota,

Saya hanya ingin menambahkan penjelasan dari Teman-teman Kemhan dari pespektif perjanjian internasionalnya itu sendiri.

Yang pertama bahwa kalau dilihat dari postur perjanjian kerja sama dengan negara-negara Timur Tengah, maka Saudi Arabia adalah negara yang paling banyak kita buat dokumen perjanjiannya. Sampai sekarang, tercatat 27 perjanjian kemudian diikuti oleh Yordan 17 dan Mesir 16. Ini menunjukkan atau merefleksikan bahwa hubungan kita dengan negara-negara Timur Tengah lebih banyak kita fokuskan sebenarnya ke Saudi Arabia jika dilihat dari jumlah perjanjian ini dan perjanjian *Defence Cooperation* yang sedang kita bahas ini adalah merupakan perjanjian yang pertama yang kita lakukan dengan negara-negara Timur Tengah. Ini juga merefleksikan betapa Saudi Arabia menjadi perhatian Indonesia.

Nah kami sendiri dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional dalam mengawal pembuatan *agreement* ini selalu ingin memastikan bahwa perjanjian ini aman dari segi politis, aman dari segi yuridis, aman dari segi *security* dana man dari segi teknis. Jadi 4 aman ini memang kita terapkan sehingga kami bisa pastikan kepada Bapak Ketua dan para Anggota bahwa perjanjian ini tidak akan mengarah kepada perjanjian Aliansi dan ini memang sudah kita pastikan sejak pembuatan draft ini.

Nah perjanjian ini draft awalnya adalah dari Indonesia. Artinya, Indonesia-lah yang melakukan perumusan draft awal sehingga dalam setiap negosiasi kalau draft awal muncul dari Indonesia, itu berarti hampir 70% kepentingan Indonesia sudah ada pada draft itu. Nah kalau kita lihat postur dari perjanjian ini, ini adalah perjanjian *defence cooperation* yang sangat *low profile*, karena kalau kita perhatikan 6 skop *cooperation* itu memang kita buat sedemikian rupa dan ini merupakan standard bagi kami dari Kementerian Luar Negeri untuk menjaga supaya ini bukan perjanjian Aliansi, selalu kita mulai dengan *capacity building, military, exchange* yang sifatnya itu tidak politis dan yang paling mungkin mendapatkan perhatian untuk perjanjian ini, yang paling maksimum itu adalah dialog strategis dan ini memang kita butuhkan untuk dialog strategis. Jadi tidak mungkin ada skop *cooperation* yang sifatnya saling mendukung atau *joint operation* atau yang sifatnya bernuansa aliansi dan memang sudah kita pastikan karena ini merupakan tugas kami untuk mengawal itu.

Nah berikutnya dalam perspektif kami, dalam perjanjian ini juga dibuka semacam suatu forum dan ini forum ini bagi kami adalah sangat penting untuk akses kepada dinamika strategi pertahanan di Timur Tengah dan ini forum ini mungkin akan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kita bisa melihat lebih dekat apa sebenarnya strategi pertahanan atau politik pertahanan yang terjadi di Timur Tengah.

Kemudian yang terakhir Pak Ketua, saya juga ingin memberikan *assessment* bahwa Saudi Arabia nanti mungkin Dirjen Aspasaf bisa melanjutkan mengenai aspek ini bahwa Saudi

Arabia sedang mengalami reformasi juga yang mungkin banyak manfaat yang kita bisa petik dari menggeliatnya Saudi Arabia saat ini.

Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Ketua.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Silakan dilanjutkan dari Kemlu.

DIREKTUR TIMUR TENGAH KEMENTERIAN LUAR NEGERI (SUNARKO):

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi.

Yang saya hormati Bapak Pimpinan Rapat beserta seluruh Anggota Komisi I yang kami hormati,

Bapak-bapak Direktur Jenderal dari Kemhan dan Kementerian Luar Negeri.

Perkenankan kami dalam kesempatan baik ini Pak untuk menyampaikan *update* atau perkembangan kerja sama *bilateral* antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi. Sebagaimana kita ketahui Kerajaan Arab Saudi merupakan mitra kita terpenting dalam konteks hubungan *bilateral* dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Pertama, karena hubungan Indonesia dengan Arab Saudi dilandasi hubungan historis sejak mulai Arab Saudi pertama kali menyampaikan dukungan pengakuan kemerdekaan Indonesia pada Tahun 1947 dan semua Kepala Negara Republik Indonesia sudah melakukan kunjungan ke Arab Saudi. Dalam konteks hubungan sosial Budaya, Arab Saudi merupakan hal penting dalam konteks ini karena jumlah warga negara Indonesia terutama yang melakukan kunjungan-kunjungan ibadah ke Arab Saudi masih merupakan negara yang terbesar dalam konteks ini. Jamaah Haji Indonesia dan Jamaah Umroh Indonesia masih merupakan yang tertinggi dengan kuota 211 ribu dan ini merupakan hubungan jangka panjang karena posisi Arab Saudi sebagai *the custodian to holimox lion 2* Kota Suci Hadimul Harfainasrifain dan posisi raja demikian. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dengan memberikan pelayanan dan juga hubungan kerja sama di bidang haji cukup berkembang dan kedepannya terus akan kita lakukan. Dari sisi ekonomi, kerajaan Arab Saudi merupakan mitra dagang terpenting kita merupakan tujuan negara bagi pengembangan dan perluasan ekspor produk-produk Indonesia khususnya produk halal dan juga merupakan pangsa negara untuk non tradisional market yang penting bagi kita dengan 30 juta jumlah penduduk Arab Saudi dan juga setiap tahunnya dengan kegiatan ibadah baik umroh maupun haji yang mencapai sekitar 2 juta warga Indonesia di Arab Saudi.

Dari sisi ini penting bagi kita untuk terus melaksanakan kegiatan hubungan kerja sama ekonomi. Dari sisi pengamanan energy, Arab Saudi dengan jumlah kapasitas produksi minyak saat ini yang mencapai 10 juta barrel per hari merupakan mitra penting bagi kita untuk pengamanan energy nasional dimana Indonesia mengimpor cukup signifikan *crude oil* dari Arab Saudi untuk memenuhi pasokan dalam negeri. Dari sisi politik Bapak kami sampaikan bahwa hubungan Indonesia dengan Arab Saudi, Arab Saudi merupakan mitra terpenting kita dalam konteks hubungan politik baik itu dalam kerangka OKI (Organisasi Kerjasama Islam), IDB (*Islamic Development Bank*) yang bemarkas di Jeddah, juga dalam JCC dimana peran Arab Saudi memiliki peran yang sangat signifikan penting dalam konteks *Gov Cooperation Council*, Dewan Kerjasama Teluk, di Liga Arab juga demikian dan peran Arab Saudi di dalam konteks hubungan Indonesia dengan dunia internasional dimana Saudi merupakan mitra Indonesia terpenting dalam saling dukung dalam organisasi internasional. Arab Saudi memberikan dukungan bagi pencalonan Indonesia sebagai Anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020 dan juga terus melakukan upaya-upaya dalam konteks penggalangan, dalam konteks kerja sama internasional. Peran Saudi yang demikian jelas menunjukkan bahwa bagi kita kedepannya merupakan hubungan yang sangat strategis bagi Indonesia. Kunjungan Raja Arab Saudi ke Indonesia, Raja Salman Bin Abdul Azis Al Saud pada Maret 2017 memberikan bobot kembali

bagi hubungan kerja sama Indonesia dengan ditandatanganinya sejumlah dokumen kerja sama perjanjian termasuk juga kerja sama di bidang energy dan investasi di sektor infrastruktur terutama untuk minat Arab Saudi untuk pengembangan sektor pariwisata.

Ini semua *on going* Bapak, *pilot cooperation* diantara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi yang terus kita pantau, kita realisasikan dan kita implementasikan. Pada sisi lain, peran Arab Saudi untuk memajukan dunia islam dan negara-negara muslim dalam kerangka OKI maupun dalam kerangka *bilateral* dengan Indonesia terus kita dorong dan kita pacu mengingat peran Saudi yang demikian penting di dalam konteks kawasan dan konteks wilayah Timur Tengah secara keseluruhan.

Dengan demikian Bapak dapat kami sampaikan bahwa Indonesia dengan Arab Saudi mempunyai hubungan tidak saja kesejarahan tetapi juga kedepannya merupakan hubungan strategis yang sangat penting di kawasan teluk mengingat posisi tadi di politik sosial budaya dan juga di ekonomi. Kehadiran warga, masyarakat Indonesia yang bekerja di Arab Saudi dan memberikan kontribusi penting bagi pembangunan Arab Saudi juga tak kurang besar jumlahnya, masih sekitar 500 ribu orang yang bekerja di berbagai profesi baik itu sektor-sektor perminyakan di Arab Saudi bagian timur maupun sektor-sektor kerja sama lainnya di masyarakat yang memberikan kemanfaatan bagi warga negara Indonesia dan juga memberikan kontribusi bagi Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap warga negara Indonesia yang bekerja di Arab Saudi berbagai sektor, profesi maupun bidang kegiatan usaha.

Demikian Bapak yang dapat kami sampaikan terkait hubungan *bilateral* Republik Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi.

Demikian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih Bapak-bapak sudah menyampaikan paparannya.

Saya langsung saja ini ada sesi pendalaman sekarang ini Pak dan sudah ada sementara 2 rencana pertanyaan atau pendalaman. Yang pertama, saya persilakan kepada Bapak Andreas, setelah ini Mas Nico.

Silakan Pak Andreas.

F-PDIP (ANDREAS HUGO PAREIRA):

Terima kasih Pak Ketua.

Saya datang yang ke sekian tetapi diberi kehormatan yang pertama, makanya saya kaget.

Pimpinan dan Anggota Komisi yang saya hormati, Wakil dari Pemerintah, dari Kemhan, Kemlu dan juga Kemkumham yang saya hormati.

Apa yang tadi Bapak-bapak jelaskan sangat bernuansa *optimistic* dan saya kira ketika kita melakukan kerja sama tentu perlu kita mempunyai visi pandangan yang optimis dengan kerja sama tersebut. Namun di pihak yang lain, kita juga perlu memperhatikan atau melihat aspek-aspek lain di luar apa yang menjadi target-target di dalam kerja sama tersebut. Beberapa waktu yang lalu, kami juga membahas ini dengan beberapa narasumber ahli dari Perguruan Tinggi dan ada beberapa hal yang sifatnya tetap tetapi juga ada beberapa aspek yang sifatnya *variable* yang berubah, cepat berubah terutama *variable* politik. Artinya, *variable* teknis bisa tetap *variable* politik ini sangat cepat berubah dan saya kira tadi masukan dari Kemlu untuk, artinya yang masukan yang disampaikan sangat *optimistic* melihat bagaimana posisi Saudi Arabia dan saya pada posisi yang melihat perubahan-perubahan yang begitu cepat walaupun situasi politik di Timur Tengah terutama posisi Saudi Arabia yang merupakan salah satu negara atau *major*

power di Timur Tengah dengan *competitor* lainnya misalnya dengan Iran atau dengan negara-negara yang ada di dalam Blok-blok kepentingan.

Nah *variable* perubahan ini apakah tidak akan berpengaruh dan mengganggu *variable* tetap yang kita menjadi target kita. Nah saya lihat ini dalam konteks politik bebas aktif kita. Secara teknis oke. Kalau kita bicara secara teknis oke tetapi secara politis dengan perubahan geopolitik yang begitu cepat di Timur Tengah yang *unpredictable* kalau kita perhatian dalam perkembangan-perkembangan, banyak sekali aspek yang berubah begitu cepat. Misalnya, bagaimana cara pandang kita di dalam melihat ISIS dengan apa yang dilihat oleh Saudi Arabia misalnya. Ini saya kira suatu hal yang harus menjadi perhatian kita juga bagaimana kita menjaga, mempunyai hubungan yang baik juga dengan negara Iran. Nah konstelasi ini, saya kira perlu menjadi hitungan kita juga apakah ini tidak akan mengubah atau tidak mengganggu hubungan kita dengan negara lain yang dalam "*competitor*" dari Saudi Arabia. Di satu pihak kita kerja sama oke bagus begitu. Artinya ini *variable* tetap di dalam kerja sama ini, tetapi *variable* yang berubah politis itu sangat *unpredictable* yang bisa merugikan suatu pihak, ini menguntungkan kerja sama. Ini tetap di pihak yang lain kita mungkin menutup diri dengan yang lain. Nah ini konteks politik bebas aktifnya yang kita harus perhitungkan dan kita jaga selama ini, karena ini prinsip.

Nah kemudian yang kedua, hal yang kedua yang juga muncul dalam dialog dan juga ini saya pikir penting untuk menjadi catatan dan perhatian sejak awal, karena di dalam *agreement* itu yang saya perhatikan komitmen, baru komitmen-komitmen kerja sama tadi yang sudah dijelaskan, komitmen kerja sama yang di bidang apa-apa, tetapi di dalam suatu kerja sama pertahanan yang dengan target-target yang pasti, yang tertentu, saya kira kita perlu merumuskan sampaikan pada *implementic agreement*-nya begitu.

Jadi apa bagaimana pengimplementasiannya dengan menghitung resiko-resiko tadi begitu. Saya masih ingat dulu ketika jadi menandatangani *defence cooperation agreement* dengan Singapura pada waktu itu sekitar Tahun 2007 atau 2008 begitu Pak. Nah itu karena 1 faktor yang kemudian membatalkan itu, membuat itu tidak berlangsung di Komisi I ini karena *implementing agreement*-nya yang kita perhatikan dari 6 point kalau tidak salah itu 5 point tidak menguntungkan kita di dalam implementasi-implementasi ke depan.

Nah saya kira 2 hal ini perlu menjadi, saya ingin melihat dari aspek-aspek lain dari nuansa agak tidak pesimistik tetapi membuat kita untuk lebih kritis berpikir, melihat persoalan ini, melihat rencana ini.

Saya kira itu pandangan pendapat saya Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Ya masukan Pak Andreas ini catatan yang sifatnya strategis juga Pak. Mungkin ini masalah ini memang tadi perjanjian yang sifatnya *low profile* tetapi *moment*-nya tepat tidak begitu karena mungkin bisa ditafsir juga seperti tadi kalau tidak dua-duanya mungkin tidak usah misalnya karena tafsir penerima bisa jadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita.

Yang berikutnya, Mas Nico.

Silakan.

F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN):

Terima kasih Ketua.

Teman-teman Rekan Komisi I, para Tamu kami yang sudah hadir pada pagi hari ini.

Mungkin pada dasarnya hampir mirip dengan apa yang disampaikan oleh Pak Andreas bahwa memang dengan politik bebas aktif yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak-bapak tadi sebenarnya sudah kita dapatkan juga tetapi sebenarnya alangkah inginnya kami disini untuk mendapatkan penjelasan yang lebih berimbang mengenai keadaan tadi kalau yang disampaikan oleh Dirjen Asia Pasific jelas sekali semuanya

positif about hubungan kita dengan Saudi Arabia tetapi perlu juga kita jelaskan keadaan sekarang karena memang kalau apa yang disampaikan oleh para pakar yang kemarin sudah datang disini dari Unpad dan lain-lain, menyatakan memang pada dasarnya dokumen ini memang netral pada waktu itu dibuat Tahun 2014 tetapi tolong dijelaskan juga kepada kami disini bagaimana potensi keadaan sekarang. Memang Bapak sampaikan tadi ini bukan ada kaitannya dengan aliansi sama sekali tetapi ketika menandatangani perjanjian militer pada saat ini, di saat hubungan Saudi Arabia dengan beberapa negara di sekitarnya secara kurang baik secara politik bagaimana apakah tidak dianggap juga itu sebagai aliansi walaupun tidak ada aliansi sama sekali yang kita tanda tangani disitu. Tampaknya kan bisa seperti itu bahwa kita sudah berada dengan rombongan Arab Saudi pada saat ini. Padahal kita sudah beberapa kali didekati, disampaikan disini dan kita juga masih seperti ini menunda-nunda ini.

Ketua,

Apakah tidak sebaiknya kita menunda dulu penandatanganan bentuk kerja sama ini atau kalau ada bisa dijelaskan lebih dalam mengenai keuntungan kita menandatangani pada saat ini yang keadaannya jelas sangat berbeda dengan ketika *draft* ini dibuat Tahun 2014. Kemudian juga disampaikan mengenai *document* yang terbaru adalah sifatnya karena fokusnya pada aspek seperti pelatihan, pendidikan kontrak terorisme dan kerja sama industry pertahanan tetapi dari yang kita dapat tadi, kegiatan-kegiatan yang sudah terjadi dari Tahun 2014 kurang signifikan mengenai kerja sama di industry pertahanan yang baru, baru sekedar datang, belum ada yang signifikan, yang signifikan malah baru bantuan seperti masjid kemudian ada juga pembicaraan-pembicaraan, pelatihan-pelatihan tetapi yang menguntungkan buat kita karena kita juga sangat berharap industry pertahanan kita bisa maju justru belum terlihat signifikan begitu baik ada sebuah MoU yang jelas atau arahnya, baru sekedar pemantauan-pemantauan saja begitu.

Kira-kira itu dari saya Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Ada lagi Bapak-bapak sebelum saya, silakan Pak Dave.

F-PG (DAVE AKBARSHAH FIKARNO, ME.):

Tambah lagi sedikit.

Untuk menambahi juga yang tadi sudah dikatakan yang soal konflik antara Saudi Arabia dengan negara-negara tetangganya seperti Yaman, terus juga *on going fute*-nya dengan Qatar, dan kita memiliki hubungan ini, kita kan tidak memiliki permasalahan dengan negara-negara tersebut dengan Yaman dan Qatar dan lain-lain, akan tetapi justru Saudi Arabia yang memiliki hubungan yang tidak baik dengan negara-negara tersebut. Nah bilamana menjalankan perjanjian ini dan kita memiliki hubungan *diplomatic* yang sangat erat juga dengan negara-negara tersebut, nah ini apakah akan ada dampak daripada kerja sama ataupun warga negara kita yang tinggal disana dan lain-lain, lalu ditambah lagi yang ingin saya pertegas ini yang masalah *counter terrorism*, kita sekarang inikan saya juga dengan Pak Hanafi, rekan-rekan, sekarang sedang masih menyelesaikan revisi RUU Terorisme. Ini yang seyogyanya seharusnya sudah selesai dari beberapa bulan yang lalu, cuman karena ada sedikit, belum mencapai kesepakatan di beberapa pointers sehingga agak sedikit tertunda terutama di dalam sisi definisi arti kata terorisme itu sendiri. Nah dari Saudi Arabia-nya pun juga masih belum memberikan definisi yang jelas apakah yang dimaksud dengan terorisme itu sendiri. Nah dengan kita masuk kerja sama, masih sama-sama itu masih memiliki ketidakpastian, nah ini bagaimana, apakah di dalam Undang-Undang ini akan ada penegasan atau ada sikap yang lebih tegas dari Saudi Arabia dalam mengenai pemberantasan ataupun definisi akan terorisme itu sendiri.

Sekian.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih Bapak-bapak.

Saya tambahkan ini Pak, saya juga punya beberapa hal yang ingin saya perdalam. Pertama di draft DCA ini disebutkan kan ada pertukaran informasi intelijen dan mungkin kalau kita selama ini menyimak berbagai macam isu terkait misalnya konflik Suni Syiah yang selalu menjadi isu yang sensitif apalagi kalau sudah dikaitkan dengan politik di dalam negeri ini, tentu itu kemudian menjadi ruwet. Nah kita mungkin perlu juga hati-hati kalau tadi Pak Andreas mengatakan kalau ini ada persaingan politik di Timur Tengah antara Saudi dan Iran. Nah ketika kita punya kerja sama informasi intelijen atau dalam hal ini *sharing* informasi, maka jangan sampai kita ini kemudian justru menjadi tempatnya mereka menjalankan *proxy war* disini begitu loh terkait dengan isu identitas *internal* antar kubu atau antar kelompok ini, karena kalau itu terjadi itu artinya berarti kita sama sekali tidak diuntungkan.

Nah yang kedua, kalau ada kerja sama industry pertahanan Pak katakanlah misalnya bikin peluru disini kemudian dibeli oleh Saudi atau dikirim ke negara lain begitu, mungkin perlu juga dipertimbangkan atau mungkin penjelasan dari Bapak-bapak kira-kira ada tidak misalnya ancaman atau mungkin *warning* dari negara-negara barat seperti Amerika atau mungkin katakanlah Uni Eropa yang punya standard terkait dengan amunisi atau alutsista ini yang sangat ketat begitu. Mereka selalu mengatakan kalau berdagang alutsista itu kriterianya kriteria yang tinggi, artinya tidak untuk kejahatan, tidak untuk terorisme, tidak untuk *membacking* gerakan-gerakan radikal dan lain sebagainya dan yang semacam itu kan perlu juga jadi pertimbangan. Jadi mungkin *profitnya* ada tetapi apakah *benefitnya* politik itu juga mengikuti. Jangan-jangan malah kita kemudian di kemudian hari yang tidak diuntungkan.

Itu saja tambahan dari saya Pak. Nanti mungkin bisa dilengkapi penjelasannya.

Saya persilakan kepada Kemhan terlebih dahulu.

DIRJEN KEKUATAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN (MAYJEN TNI BAMBANG HARTAWAN, M.SC.):

Terima kasih atas pendalaman yang disampaikan kepada kami.

Tentunya semuanya adalah merupakan dukungan dan untuk kebaikan kita bersama. Secara umum nanti ini akan dijawab oleh beberapa rekan kami sesuai dengan bidangnya nanti. Bagi kami, ini kerja sama tentunya kita berangkat dari suatu niat yang baik dimana dalam melaksanakan diplomasi pertahanan kami senantiasa untuk selalu mencari teman dengan sebanyak-banyaknya. Sesuai dengan politik luar negeri yang disampaikan tadi, kita bebas aktif dan sebagainya, mungkin nanti dari Kementerian Luar Negeri yang menyampaikan itu. Dengan demikian nanti ada beberapa pertanyaan dari Pak Andreas kemudian Pak Nico tentang masalah Inhan yang kurang signifikan yang dijawab Dirjen Pothan, kemudian dari Pak Ade juga.

Kami silakan yang pertama dari Pak Bambang.

Silakan.

KEMENTERIAN PERTAHANAN (BAMBANG):

Terima kasih Pak atas izin dari Pimpinan, kami ingin mencoba untuk menjawab. Kami akan menjawab pertanyaan yang Pak Nico dengan Pak Dave.

Yang pertama, bahwa kerja sama itu belum signifikan. Ini baru pemantauan. Kemudian Pak Dave tadi bilang ini harus tegas terkait dengan kerja sama Pemerintahan Terorisme. Yang pertama memang betul bahwa sampai dengan saat ini kerja sama kita dengan Saudi Arabia itu baru pemantauan karena masing-masing masih menunggu *legal basic* Pak. *Legal basic*-nya itu adalah kerja sama ini yang harus diratifikasi, karena mereka juga mempersyaratkan itu. Dengan demikian, meskipun untuk pemantauan tetapi arah untuk lebih konkrit misalnya untuk menindaklanjuti pemantauan-pemantauan itu Insya Allah akan dikonkritkan setelah kerja sama ini kita ratifikasi.

Kemudian terkait dengan pertanyaan Pak Dave pemberantasan terorisme perlu sikap yang tegas. Saya tahu betul bahwa Pak Dave ini adalah salah satu Anggota Panja, kita sering ketemu disitu. Kemhan TNI sebetulnya sudah prepare dalam rangka kerja sama terorisme seperti yang sekarang dilaksanakan dengan beberapa negara. Kita sementara memang sedang berjuang untuk masuk dalam Rancangan Undang-Undang Terorisme yang baru. Bapak sudah tahu betul Pasal 43 dan sebagainya, namun demikian kami sendiri juga memperkuat itu dalam rangka mengimplementasikan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 34 yang nantinya misalnya pilihannya seperti yang kemarin itu disampaikan oleh Panglima TNI itu kemudian tidak masuk misalnya kami juga sudah punya jalan keluarnya, kemarin sudah kita bicara dengan beberapa Anggota Panja bahwa nantinya kita akan bikin PP atau Perpres dalam rangka memperkuat itu sehingga kemudian fungsi itu karena sudah diatur dalam Undang-Undang 34 maka kemudian itu yang akan diperkuat. Nah dengan dasar itu, kemudian kerja sama dengan Saudi Arabia dan sebagainya paling tidak meskipun tidak latihan bersama tetapi informasi tentang terorisme dan sebagainya itu yang nanti akan kita perkuat.

Kemudian pertanyaan yang berikutnya yang tadi mungkin tidak sempat dijawab. Dari awal Pimpinan tadi Pak Hanafi menanyakan tentang Pasal 2 ayat (6) Pak yang terkait dengan bidang kerja sama militer lain yang disepakati misalnya, disepakati oleh para pihak. Itu sebetulnya bentuknya apa. Itu sebetulnya penjelasannya adalah Indonesia maupun Saudi Arabia itu misalnya ini salah satu contoh itu sama-sama Anggota dari *International Kongres Military Medicine* misalnya. Selama Anggota Anggota *International Military Medicine* itu juga ada hal-hal yang khusus yang tidak hanya terkait dengan pelayanan kesehatan yang mereka akan kita kembangkan bersama. Dalam beberapa kesempatan Kongres di *Military Medicine* yang ke-40 itu dilaksanakan di Jeddah di Saudi Arabia Tahun 2013 kemudian pernah di India, konteks-konteks itu sudah pernah dilaksanakan antara lain misalnya kalau misalnya ini jadi ratifikasi ini kerja sama militer itu antara lain misalnya kita akan coba bicarakan lebih detail bagaimana kerja sama *the rule of Military Medicine in the shutter relief operation* misalnya, kemudian ada lagi *emergency rehabilitation head care doing combat*, itu hal-hal yang terkait dengan *military medicine* yang gas militer, itu yang kemudian coba kita kerja sama. Itu yang sebetulnya yang dimaksud dengan bidang kerja sama militer lain lalu para pihak. Namun demikian tidak akan ini kemudian mengarah kepada aliansi karena disepakati para pihak. Artinya, kita pun harus tahu bagaimana menyikapi kalau misalnya ada usulan mereka. Kita tahu rambu-rambunya, kita tahu apa yang sudah disampaikan oleh Komisi I misalnya. Yang jelas, kerja sama itu tidak akan mengarah kepada yang dinamai Aliansi.

Demikian penjelasan kami.

Terima kasih.

SESDITJEN POTENSI PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN (BRIGJEN TNI SUNARYO, S.E.)

Izin Pimpinan.

Kami dari Ditjen Potan menambahkan beberapa hal.

Yang pertama tadi disampaikan kenapa Arab Saudi. Tadi sudah dijelaskan bahwa Arab Saudi itu adalah negara terbesar di kawasan itu. Justru itu menjadi pintu kita. Kalau disini ada klausul pertukaran informasi intelijen di bidang pertahanan, bagaimana kita tahu masalah ISIS, perkembangannya, teroris perkembangan disana kalau kita tidak punya kerja sama, sehingga kita memang perlu untuk mendapatkan informasi tentang kawasan di Timur Tengah. Mereka juga tentu ingin melihat perkembangan kawasan misalnya Laut China Selatan, pasti dia tanyanya sama Indonesia. Jadi ini antara lain itu.

Jadi justru kita perlu dan dia juga perlu. Kita sama-sama membutuhkan informasi tentang intelijen.

Yang kedua tadi juga sudah disampaikan masalah perkembangan industry, kerja sama industry teknologi. Setelah 2014 ditandatangani kita mengirim Tim kesana dan mereka juga sudah 2 kali mengirim Tim ke Indonesia, mereka menandatangani PT Pindad, PT DI dan PT PAL. Kita tahu mereka punya peralatan yang canggih dan cukup besar tetapi dari segi pemeliharaan mereka SDM-nya sangat lemah sehingga dia mengandalkan kita untuk itu. Hanya

sampai saat ini kita belum *action* baru saling menjajaki karena apa? Karena ini belum diratifikasi. Kalau begitu ini diratifikasi, pasti implementasinya cepat kita laksanakan.

Jadi saya melihat dari segi pengembangan kerja sama bidang teknologi ini benar-benar sangat menguntungkan kita.

Demikian tambahan dari kami.

Terima kasih.

SEKTRETARIS DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI (DR. iur. DAMOS DUMOLI AGUSMAN, S.H., M.A.):

Pak Ketua dan Para Anggota,

Terima kasih.

Saya hanya ingin menambahkan beberapa hal.

Yang pertama, kami mencatat adanya *sentiment* kekhawatiran mengenai masalah ini dan mudah-mudahan penjelasan dari perspektif perjanjian ini bisa sedikit *is in the set*. Yang pertama, justru karena politik luar negeri kita bebas aktif maka kita berani membuat DCA yang *modest* ini. Kalau kita melihat *record* kita, kita sudah melihat DCA dengan Jerman, Australia, Vietnam, Pakistan, Turki, Amerika dan China, Ceko, Polandia, Brunei, India dan Philipina. Ini dari pengalaman kami tidak ada reaksi yang seperti kita khawatirkan dengan kita meratifikasi DCA ini karena isinya hampir sama. Standard DCA ini, isinya kontennya bisa kami pastikan karena kami yang mengawal, itu sama isinya yaitu *as modest as possible* yang tidak dimaknai sebagai suatu perjanjian aliansi.

Kemudian yang kedua, *next* nanti mungkin Bapak-bapak/Ibu di Komisi I ini akan menerima lagi berbagai limpahan DCA dengan negara-negara lain dan kami mencatat nanti *coming is next* itu justru ada misalnya dengan Rusia, Belanda, Korea, Spanyol, Serbia, dan Thailand. Nah karena kontennya sama, kami memang tidak melihat bahwa ini akan menimbulkan suatu gejolak yang kita khawatirkan. Dan 1 lagi yang mungkin menarik adalah kita selalu menjaga keseimbangan karena politik bebas aktif, kita selalu menjaga keseimbangan dan dalam membuat perjanjian ini. Misalnya dengan Iran kita akan mengajukan perjanjian ekstradisi yang nanti juga akan kita sampaikan. Jadi *exercise* kita dalam produksi perjanjian-perjanjian ini *so far* sampai saat ini tidak menimbulkan tanda tanya ataupun tidak menimbulkan reaksi dari negara-negara yang berkompetisi ini. Ini yang bisa kita sampaikan. Mungkin karena kontennya yang demikian *modest* dan memang kerjasamanya kita perbuat sedemikian rupa tidak menimbulkan pertanyaan itu. Memang patut diakui bahwa negara-negara yang berkompetisi ini selalu mencari informasi. Itu memang wajar dalam setiap hubungan diplomasi mereka selalu bertanya tetapi hanya sekedar bertanya dan tidak memberikan reaksi apa-apa dan ini kemudian ini juga mungkin bisa *using the sentiment*, rumusan dari perjanjian ini kita buat sedemikian rupa sehingga pengalaman-pengalamannya cukup kental. Yang pertama dari *preamble* saja sudah kita pastikan bahwa ini harus sesuai dengan hukum nasional. Kemudian dapat kita hentikan atau kita terminasi dalam model *unilateral* begitu ya. Jadi kalau misalnya kita tidak suka dengan perjanjian itu, *anytime* kita bisa *terminate*. Itu juga kita amankan disini dan kemudian yang paling penting lagi kita dapat mengubah apa yang kita inginkan terhadap perjanjian ini jika nanti sudah berlaku dan jika tidak disetujui perubahan itu, kita dapat mengatakan oke kita hentikan perjanjian ini. Jadi dari sisi *tax the treaty in self* kita sudah memberikan pengamanan yang cukup baik sehingga saya tidak melihat bahwa ini akan berpotensi justru merugikan kepentingan kita.

Dan yang terakhir, dari perspektif kritis semacam ini hanya bersifat prejing dalam pengertian begini. Ini skenario yang *high potetical* saja. Kalau ini sudah *entry to force* kemudian Teman-teman di Kemhan tidur saja begitu ya, ini juga tidak akan berjalan *treaty* saja. Jadi ini sekedar misalnya menyediakan rumah dimana kita bisa berinteraksi dan bekerja sama tetapi memang lebih baik ada *treaty* ini untuk bisa memulai suatu kerja sama yang baik karena diatur dengan baik di dalam pasal demi pasal dalam *treaty* ini dan kemudian tadi menarik juga pertanyaan mengenai *other military cooperation*. Ini memang standard dan ini memang kita sengaja buat itu untuk membuka adanya kemungkinan kerja sama lain yang tidak terbayangkan pada saat ini dan mungkin akan ada tetapi selalu kita pagari dengan suatu kalimat. Jadi ini

biasanya kalimat itu datang dari kita yaitu *as a great by the factice*. Jadi kalau tidak *a great by the factice* ya tidak akan bisa diusulkan *other cooperation* begitu loh. Ini juga pengaman-pengaman yang sudah kita amankan sedemikian rupa sehingga perjanjian ini dapat kita katakan sangat *lose* dalam pengertian legalistiknya tetapi sangat efektif untuk dimantapkan dalam kerja sama berikutnya.

Demikian Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Pak,

Kita pernah mem-*propose* juga DCA dengan Iran misalnya kayak begitu? Atau ada rencana tidak misalnya?

DIRJEN KEKUATAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN (MAYJEN TNI BAMBANG HARTAWAN, M.SC.):

Kami izin.

Jadi saya sebelum ini, itu saya Dirkesin. Jadi 2015 memang Iran itu kencang untuk kita melaksanakan minta DCA dengan kita. Hanya tetap kami dalam konteks hubungan luar negeri, kami tetap menunggu *green light* dari Kemlu. Sampai saat ini, kami masih membahas tetapi belum membutuhkan ini belum, masih menunggu *green light* dari Kemlu.

Demikian Pak.

Jadi kalau Adhan Iran setiap saat datang ke kantor kami untuk menanyakan ini. Saya pikir juga ini karena ada kaitannya dengan DCA ini, tetapi kami masih menunggu *green light* dari Kemlu.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Kalau Kemlu, bagaimana Pak?

Mohon tanggapannya.

DIREKTUR TIMUR TENGAH KEMENTERIAN LUAR NEGERI (SUNARKO):

Terima kasih Bapak Pimpinan dan Para Anggota yang terhormat.

Dalam menyikapi atau dalam kita mendorong hubungan *bilateral* dengan negara-negara di kawasan terutama juga negara Arab Saudi, Kerajaan Arab Saudi, senantiasa kita mengedepankan prinsip-prinsip kesetaraan dan juga diupayakan dan diarahkan agar kerja sama itu memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi rakyat kedua negara dan juga Pemerintah. Kita terus mencermati keadaan dan perkembangan situasi di Timur Tengah, tidak saja dalam konteks terakhir ini tetapi juga terlebih sebelum enyah pada saat krisis Arab *Spring* 2009, terus berkembang sampai dengan beberapa negara yang telah berhasil seperti misalkan Tunisia dimana kita memberi kontribusi kelanjutannya dalam proses pembelajaran dan juga *sharing base practices* mengenai demokratisasi dan juga negara-negara yang pada akhirnya belum berhasil mencapai proses demokrasi sebagaimana Yaman, Suriah dan sebagainya.

Dalam konteks Arab Saudi, kita melihat perkembangan terakhir sejak kunjungan Raja Arab Saudi kita anggap sebagai *turning point* dimana hubungan atau arah kebijakan Kerajaan Arab Saudi lebih kepada is lop porsi, melihat kepada negara-negara timur dengan melakukan kunjungan ke sejumlah rangkaian kunjungan muhibah ke negara-negara di Kawasan Asia, tidak hanya Indonesia tetapi waktu itu juga Malaysia dan Brunei Darussalam walaupun hanya beberapa jam. Ini merupakan satu langkah, satu terobosan Pemerintah Arab Saudi yang melihat

kawasan negara di Asia terutama Indonesia dalam konteks karena jumlah penduduk muslim terbesar dan konteks hubungan kesejarahan dan hubungan yang sedang berkembang. Nah ini merupakan suatu hal dimana Raja Arab Saudi sebelumnya tidak pernah melakukan kunjungan ke negara manapun. Jadi kunjungan ke Indonesia termasuk juga rangkaian ke negara-negara di Asia Tenggara pada Maret 2017 merupakan suatu arahan positif bagi kita yang perlu kita tangkap sebagai salah satu momen penting dalam pengembangan hubungan jarak ke depan.

Kemudian pada 2017 juga terakhir belum lama berselang, Gombis Putra Mahkota Muhammad Bin Salman kembali meluncurkan Saudi *Sesion* 2030 dimana berkomitmen untuk melakukan reformasi total di dalam sistem kerajaan dan juga menciptakan kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan yang lebih baik dan mewujudkan islam yang lebih moderat di Arab Saudi. Dengan demikian menjadi mitra penting kita dalam konteks kita untuk memberikan kontribusi bagi upaya mewujudkan Islam yang moderat *and* rahmatan lil'alam.

Dalam konteks revalidasi, kita cermati juga memang dalam konteks ini Indonesia berupaya untuk selalu hadir dalam konteks ini memberikan kontribusi baik itu pemikiran, baik itu upaya-upaya untuk ikut memberikan sumbangsih pemikiran bagi ke arah proses perdamaian atau proses rekonsiliasi termasuk yang terakhir dalam konteks *diplomatic relation* antara Arab Saudi dengan Qatar dan Arab Saudi dengan negara-negara lainnya *quarted* Arab dengan Qatar. Indonesia juga menyikapi ini dalam konteks bagaimana kita memelihara hubungan *bilateral* baik dengan Kerajaan Arab Saudi dan negara-negara lainnya dan Qatar dengan menggunakan atau dengan senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip non *intervenes*, tidak memihak atau tidak campur dalam urusan negara-negara lain dan disiapkan memberikan kontribusi bagi. Oleh sebab itu, pada saat Raja Arab Saudi misalkan datang berkunjung ke Indonesia pada Maret 2017 atau Oktober 2017 kita juga menerima kunjungan Emir Qatar. Dalam konteks ini kita melihat bahwa hubungan Indonesia dengan Arab Saudi sebagai negara sahabat juga hubungan Indonesia dengan Qatar juga sebagai negara sahabat, sebisa mungkin kita memberi kontribusi bagi upaya mereka untuk mendorong ke arah dialog dan penyelesaian secara konstruktif tanpa harus melibatkan atau mendorong ke arah konflik yang berkepanjangan. Di dalam konteks Saudi dan Iran misalkan pada saat mereka juga melakukan pemutusan hubungan *diplomatic* pada 2016 karena krisis Arab Saudi dan Iran, Indonesia juga hadir menawarkan kedua belah pihak untuk memberikan kontribusi bagi upaya mediasi ataupun dialog bagi kedua negara.

Demikian pula pada saat Pak Presiden Jokowi hadir di Arab, *American Islam Submit* di Riyadh belum berselang di 2017, Indonesia hadir dalam forum besar dan terhormat tersebut dengan menawarkan solusi khas Indonesia dalam *counter terrorism* dan upaya-upaya mengatasi terorisme dengan menawarkan keberhasilan, *license* Indonesia dalam konteks negara-negara di kawasan. Dengan demikian kita hadir tidak saja ikut tetap juga kita menawarkan solusi, kita menawarkan kontribusi bagi upaya-upaya di kawasan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Dengan demikian Bapak Pimpinan bahwa ke depannya dengan memanfaatkan kunjungan Raja ke Indonesia pada 2017 yang sudah melihat Asia dan khususnya Indonesia sebagai bagian dari *policy* luar negeri penting Arab Saudi dan kedepannya dengan melihat dinamika konsiliasi di Arab Saudi terutama dengan naiknya Pangeran Muhammad Bin Salman menjadi Putra Mahkota dengan visi kedepannya, maka peluang pengembangan kerja sama Indonesia dengan Arab Saudi menjadi lebih terbuka luas terutama untuk visi ekonomi 2030 dimana Indonesia bisa memperoleh manfaat dan juga mengambil peran yang lebih konstruktif.

Demikian Pak Pimpinan dan para Anggota.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Ada masukan lagi Bapak/Ibu atau Bapak-bapak? Cukup?

Terima kasih Bapak-bapak dari Kemhan, dari Kemlu yang sudah memberi paparannya, sehingga prinsip kehati-hatian atau kecermati kita dalam rangka untuk menuju ratifikasi ini tetap akan kita pegang ini Pak walaupun tadi disampaikan nada optimisme dan tentu proyeksi *benefit* apakah sifatnya ekonomi, pertahanan maupun yang lain tetapi saya kira kita tidak bisa memungkirkan fakta bahwa di Timur Tengah khususnya Arab Saudi memang punya semangat yang sangat tinggi untuk menggalang kekuatan negara manapun terutama tentu negara-negara yang

mayoritas berpenduduk muslim. Sebagai catatan saja, Aliansi *Counter Terrorism* yang dipimpin oleh Saudi itu sudah menggalang 41 negara. Kita pernah diminta untuk mendukung tetapi Bu Menlu mengatakan maaf kita tidak bisa terlibat karena tidak sesuai dengan prinsip luar negeri kita tetapi negara tetangga kita Brunei dan Malaysia ikut.

Jadi saya kira itu perkembangan yang perlu kita cermati dalam konteks kehati-hatian itu karena faktanya juga ISIS yang selama ini menjadi gerakan radikal yang memunculkan *counter terrorism* Arab Saudi pun juga sebenarnya di Irak dan Suriah sudah drastis menurun kekuatannya. Lantas kalau tetap mau didorong Aliansi taktis *counter terrorism* ini sebenarnya yang mau dilawan itu siapa, orang menafsirkan oh jangan-jangan negara tetangganya di Persia, bukan terorisme lagi tetapi konter Iran begitu.

Jadi dalam konteks itu pula mungkin Pak saya usulkan ada baiknya pula kalau memang dari sisi Saudi ini sudah hampir mau ratifikasi ya kita sebagai negara bebas aktif dan supaya antara aksi dan persepsi itu tidak menyimpang jauh, aksi kita adalah ratifikasi, sifatnya *low profile, modest* tetapi dipersepsi oleh negara-negara Iran dan yang lain-lain kita ini memihak, tentu ini kemudian tidak menguntungkan kita. Minimal misalnya ketika mau menggalang dukungan untuk Anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap misalnya atau mungkin kepentingan-kepentingan jangka pendek yang lain bagi Indonesia. Jadi saya pikir kalau memang sudah ada pembicaraan-pembicaraan kenapa juga tidak didorong sehingga aksi kita bahwa kita ini menjaga independensi politik luar negeri itu, yang dipersepsi sama dengan mau kita, tidak ditafsirkan secara politik dengan pihak yang lain. Jadi saya kira konteks kecermatan atau kehati-hatiannya saya tambahkan semacam itu Pak.

Saya kira demikian. Terima kasih Bapak semua atas pemaparannya dan juga pendalaman dari para Anggota yang terhormat.

Rapat saya tutup.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.56 WIB)

Jakarta, 6 Februari 2018

a.n. KETUA RAPAT

SEKRETARIS RAPAT,

SUPRIHARTINI, S.I.P., M.Si.

NIP. 19710106 199003 2 001